Rohmat Zaini, Dkk.

DINAMIKA PEMIKIRAN INTELEKTUAL MUDA NU

Editor:
Ngainun Naim

Rohmat Zaini, dkk.

DINAMIKA

Pemikiran Intelektual Muda NU

Editor

Ngainun Naim

LENTERA
KREASINDO

DINAMIKA PEMIKIRAN INTELEKTUAL MUDA NU

© Rohmat Zaini, dkk, 2016
All rights reserved

---

x + 270 hlm; 16 x 24 cm
Cetakan I, April 2016
ISBN: 978-602-1090-95-4

Penulis: Rohmat Zaini, dkk.
Lay Out & Desain Sampul: Linkmed Pro Jogja

Copyright © 2016
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

---

Diterbitkan Oleh:
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Cabang Tulungagung

Bekerjasama Dengan
Lentera Kreasindo
Jl. Depokan II/530, Peleman Kotagede Yogyakarta
Telp (0274) 4436767, 0815 7876 6720
Email: lenterakreasindo@yahoo.co.id

Dicetak Oleh:
Lingkar Media Yogyakarta
(0274) 6861550, 0856 4345 5556
Email: lingkarmedia@mail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR:
MENGGERAKKAN POTENSI LITERASI YANG TERABAIKAN
↳ *Rohmat Zaini* iii

DAFTAR ISI vii

BAB I:
NU DALAM DINAMIKA SOSIAL KEAGAMAAN 1

DUA PERSPEKTIF SEJARAH:
MELIHAT NAHDLATUL ULAMA (NU) DARI LUAR
↳ *Agus Zaenul Fitri* 2

RELASI NAHDLATUL ULAMA
DAN KEMAJEMUKAN MASYARAKAT PAPUA
↳ *Eko Siswanto* 16

KHITTAH POLITIK NU
↳ *Rizal Mubit* 23

MANHAJ FALAK NAHDLATUL ULAMA
(MADZHAB "SETENGAH" RUKYAH "SETENGAH" HISAB)
↳ *Ahmad Musonnif* 28

MEMAHAMI MA'NA AL-JAMA'AH DALAM MENJAWAB
ISLAM ALA NABI (AKAR DARI AHLU AL-SUNNAH
WA AL-JAMA'AH SEBAGAI PAHAM NU)
↳ *Muhamad Nawawi* 37

BUDAYA JAWA: TRADISI SLAMETAN
DAN KONSISTENSI NU MEMPERTAHANKAN TRADISI
↳ *Fathurrohman Nur Awalin* 46

TAWASSUL DALAM DO'A
(STUDI KAJIAN ANALISIS KUALITAS HADITH
TENTANG TAWASSUL)
↳ *Shofwan Aljauhari* 54

NU, PESANTREN DAN KEARIFAN HUMOR
↳ *Arman Marwing* 89

BAB II:

NU DAN KONTESTASI IDEOLOGI **97**

NU, ISLAM NUSANTARA DAN ISLAM TRANSNASIONAL
↳ *Nur Aziz Muslim* 98

NU DAN ISLAM NUSANTARA
(TRADISI KE ISLAMAN YANG TERORGANISASI)
↳ *Nur Efendi* 102

ROMANTISME MUHAMMAD NU
↳ *A. Hakam Sholahuddin* 117

NU DALAM LINTASAN MEDSOS
↳ *Muhammad Choirur Rokhim* 121

NU DI TENGAH-TENGAH KEPUNGAN IDEOLOGI
DAN KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS
↳ *M. Jazeri* 126

NU DALAM PERGULATAN FUNDAMENTALISME
DAN PANCASILA
↳ *Yusuf* 141

ASWAJA AN-NAHDLIYAH DALAM LINGKARAN
BENTURAN IDEOLOGI
↳ *Ali Nur Rofiq* 152

PERANG AMALIAH NU
TERHADAP RADIKALISME
↳ *Hayat* 160

BAB III:

NU DALAM DINAMIKA PENDIDIKAN **169**

SANTRI NU JADI INSINYUR(?)
↳ *Ahmad Yuzki Maksum* 170

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
↳ *Alfin Mustikawan* 183

ORGANIZING DITINJAU DARI BEBERAPA PERSPEKTIF
↳ *Sumarto* 192

KONTRIBUSI NADHLATUL ULAMA
DALAM PENDIDIKAN NASIONAL
↳ *Tika Mardiyah* 204

PENDIDIKAN DASAR BAGI ANAK, TINJAUAN YURIDIS
HISTORIS DAN TEORITIS
↳ *As'aril Muhajir* 214

BAB IV:

NU DAN TRANSFORMASI **227**

KADER NU: BERKARAKTER 'NDESO', BERWAWASAN
'SEGORO'
↳ *Chusnul Chotimah* 228

ADA APA DENGAN NU?
↳ *Kutbuddin Aibak* 237

NU DAN KOSMOPOLITANISME ISLAM
↳ *Lukman Santoso Az* 244

RUMAH SAKIT, MINI MARKET, DAN KAMPUS
↳ *M Arif Faizin* 250

PESANTREN, NU DAN SUFISME
DI TENGAH MODERNITAS
↳ *Syamsun Ni'am* 255

NU DI TENGAH-TENGAH KEPUNGAN IDEOLOGI DAN KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS

M. Jazeri, abahfuad69@yahoo.com

Sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) bagaikan kacang goreng yang enak, renyah, dan (karenanya) laris manis. Metafora 'kacang goreng' memang tidak seutuhnya tepat, namun paling tidak mewakili kondisi nyata NU saat ini. Karena prinsip ideologinya yang lebih lentur, dibanding kelompok lain sejenisnya, warga NU menjadi target utama penanaman ideologi-ideologi lain yang belakangan ini tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Ideologi tersebut ada yang berasal dari lokal dan ada juga yang berasal dari luar yang diimpor oleh sebagaian kaum muslim Indonesia. Bahkan, akhir-akhir ini muncul kelompok yang mengatasnamakan NU membuat *website* di media sosial sedangkan tujuannya untuk menggembosi NU. Mereka memposting berita-berita tentang NU namun tujuannya untuk mengadu domba warga NU (satuislam.wordpress.com). Perselisihan kecil di tubuh NU diekspose besar-besaran seolah para pengurus NU sudah tidak lagi bersatu. Selain berita, artikel-artikel yang ditulis juga sedikit-demi sedikit mengkritik tradisi-tradisi yang selama ini diamalkan oleh warga NU, seperti tahlilan, tawasul, ziarah kubur, dan maulid Nabi. Setelah ditelusuri, ternyata diketahui bahwa sang pemilik akun bukanlah warga NU, melainkan orang di luar NU yang ingin memecah belah NU.

Sebagai respon terhadap kondisi sosial keagamaan saat itu, NU lahir sebagai organisasi keagamaan. Seiring perjalan waktu, sejarah NU diwarnai oleh perubahan paradigma perjuangan. NU pernah

berubah menjadi partai politik, berfusi dengan partai lain, keluar dari partai politik untuk kembali ke khittah 1926, dan terakhir ikut berpolitik dengan membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bagaimana warga NU menyikapi ideologi lokal? Bagaimana warga NU menghadapi ideologi impor? Dan bagaimana perubahan paradigma pemikiran NU menghadapi godaan politik praktis?

NU dan Ideologi Lokal

Tidak dipungkiri lagi bahwa Indonesia adalah lahan subur tumbuhnya berbagai ideologi lokal yang ada sebelum ideologi-ideologi dan agama lain datang. Ideologi lokal tersebut berupa agama atau tepatnya kepercayaan lokal. Indonesia adalah negeri besar tidak hanya karena wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak, budaya yang beragam, bahasa yang bermacam-macam, melainkan juga karena banyaknya jumlah kepercayaan lokal yang tumbuh dan berkembang di negeri nusantara ini. Setiap suku memiliki budaya dan sistem kepercayaan yang berbeda dari suku lainnya, bahkan dalam satu suku, misalnya Jawa, ditemukan puluhan aliran kepercayaan.

NU adalah salah satu pengamal Ahlu Sunah wal jama'ah (Aswaja) yang berpegang pada prinsip (1) *Attawassuth,* (2) *Al i'tidal,* (3) *Attawazun,* (4) *ta'awun,* dan (5) *Tasamuh. Al-I'tidal* bagi warga nahdhiyin berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Prinsip keadilan, untuk semua pihak, terutama dalam masalah perlindungan hak dan kewajiban, juga dalam penetapan hukum. Hal ini didasarkan QS. Al-Maa'idah ayat 8. *At-Tawazun* berarti keseimbangan (harmonis), tidak berat sebelah. Bersikap harmonis antara orientasi kepentingan individu dengan kepentingan golongan, antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi, antara keluhuran wahyu dengan kreativitas nalar. Sikap ini didasarkan pada firman Allah,

> *"Sesungguhnya, kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Al Qisth)" (Al Hadid 25).*

"Allahlah yang menurunkan kitab dan membawa kebenaran dan menurunkan neraca (keadilan)" (QS. Asy-Syura, ayat 17).

Ta'awun adalah sikap saling menolong, sementara sikap *tasamuh* (toleransi), dapat menerima kebenaran meskipun dari orang lain, dan dapat menerima kesalahan meskipun berasal dari diri sendiri, menghormati kebaikan orang lain dan mengoreksi kejelekan diri sendiri. Toleransi ini ada dua bentuk, yakni toleransi antar umat beragama dan toleransi intra umat beragama. Kepada orang yang berbeda agama maupun kepada saudara sesama muslim, kita harus toleransi dengan menghargai, menghormati, dan tidak mencela, mencaci, dan mengganggu mereka.

Sumantri Zakaria (2002) menjelaskan bahwa bagi kaum Aswaja, sikap *al-tawasuth* dapat dilihat dalam berbagai ajaran mereka baik di bidang aqidah, syari'ah, tasawuf, pergaulan, bernegara, berbudaya, dan berdakwah. Di bidang aqidah, warga NU menjaga (1) keseimbangan antara penggunaan dalil *aqli* (argumentasi rasional) dengan dalil *naqli*, (2) berusaha sekuat tenaga memurnikan Aqidah Islamiah, dan (3) tidak segera menganggap bid'ah, musyrik, dan kufur atas mereka yang karena satu dan lain hal belum dapat memurnikan aqidahnya. Di bidang syari'ah, warga NU (1) selalu berpegang teguh padaal-Qur'an dan al-Sunnah, (2) pada masalah yang sudah ada, dalil nash yang *muhkamat, sarih, qath'i* tidak dicampur dengan pendapat akal, dan (3) pada masalah yang *dhanniyat* (tidak jelas dan tidak pasti) dapat ditoleransi adanya perbedaan pendapat selama masih tidak bertentangan dengan prinsip agama.

Di bidang Tasawuf, warga NU (1) tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha mendalami penghayatan ajaran Islam, (2) mencegah ekstremisme dan sikap berlebihan, dan (3) berpedoman bahwa akhlaq yang luhur selalu berada di antara dua ujung sikap ekstrim *(tatharruf)*. Di bidang *mu'asyarah* (pergaulan) antargolongan, kaum nahdliyin selalu (1) mengikuti tabi'at watak manusia sebagai mahluk sosial, (2) pergaulan harus berdasarkan saling pengertian dan saling menghormati, dan (3) permusuhan hanya boleh dilakukan

terhadap sesuatu golongan yang nyata-nyata memusuhi agama Islam dan umat Islam.

Di dalam bernegara, kaum nahdliyin berpandangan; (1) negara nasional (yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat) wajib dipelihara dan dipertahankan eksistensinya, (2) penguasa negara (pemerintah) yang sah harus ditempatkan pada kedudukan terhormat ditaati selama tidak menyeleweng dan atau tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah, dan (3) kalau terjadi kesalahan pada pihak pemerintah tata cara memperingatkan, melalui cara yang sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di bidang kebudayaan, warga NU memiliki dua sikap nilai lama yang baik dipelihara dan dikembangkan dan yang baru yang lebih baik diterima dan dimanfaatkan *(Al-Muhafadhatu'ala al-qadimi al-shalehwal-akhdzu-bi al-jadiidi al-ashlah).* Selain itu, warga NU tidak boleh bersikap apriori, selalu menerima yang lama dan menolak yang baru atau sebaliknya. Dalam berdakwah, warga nahdhiyin berpandangan bahwa berdakwah adalah mengajak masyarakat untuk berbuat yang lebih baik. Berdakwah bukan menghukum.

Selain itu, NU berdiri salah satunya karena merespon gerakan Muhammadiyah yang lebih puritan. Secara kultur, NU mewarisi paham dan metode dakwah yang dikembangkan oleh para Wali Sanga dan ulama-ulama terdahulu yang berusaha melakukan akulturasi (bahkan pribumisasi) Islam (Koirudin, 2005: 4). NU tampil dengan identitas Islam tradisionalis yang berbasis pesantren.

Dengan ideologi yang lebih lentur dan terbuka, NU mudah bergaul dan menerima unsur-unsur lokal yang masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Penggunaan sesaji, kepercayaan pada klenik, pantangan dan tabu yang dipercayai oleh masyarakat setempat juga dipercayai oleh warga NU (memang bagi orang yang tahu dapat menjelaskan makna dari tradisi-tradisi tersebut dan sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam hal tersebut masih bisa diterima). Bahkan banyak warga nahdhiyin yang juga bergabung dalam paguyuban-paguyuban yang mengamalkan tradisi lokal.

NU dan Ideologi Trans-Nasional

Indonesia adalah negara yang strategis dari berbagai aspeknya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, yakni benua Asia dan Australia serta samudera India dan samudera Pasifik. Karenanya, Indonesia menjadi wilayah lintas antar benua. Secara demografis, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar 250 juta. Tentu dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut, Indonesia menjadi negara yang menguntungkan untuk sebagai tempat berinvestasi dan menjual berbagai produk demi keuntungan ekonomi. Secara politis, sikap politik luar negeri yang bebas-aktif membuat Indonesia sebagai negara tujuan yang aman. Hal ini membuat orang yang berkunjung untuk berinvestasi maupun sekedar berlibur tidak khawatir ancaman keamanan.

Posisi staregis ini menjadikan Indonesia negeri yang kaya akan sumber daya alam. Berbgai kekayaan alam tersimpan di perut bumi Indonesia. Karena itu, banyak orang luar yang ingin ikut menikmati kekayaan tersebut, baik dengan cara yang legal mapun ilegal. Jumlah penduduk yang besar, wilayah yang sangat luas, budaya yang beragam, agama yang berbeda-beda, membuat orang asing yang ingin menguasai kekayaan Indonesia memiliki banyak cara untuk mengganggu Indonesia sehingga mereka bisa masuk dan menikmati kekayaan Indonesia secara ilegal. Mereka menyadari bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, yang selama ini dapat hidup berdampingan, saling menghormati, dan saling menghargai tanpa gejolak yang memecah belah bangsa ini, suatu saat bisa dijadikan pintu masuk untuk memecah belah bangsa ini. Ketika bangsa ini terbelah ke dalam berbagai agama dan ideologi, mereka akan mencari isu-isu sensitif yang dapat membuat berbagai agama dan ideologi tersebut saling berseteru. Jika sudah demikian, kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran, dan rukun tinggal kenangan. Jadilah bangsa Indonesia bangsa yang lemah karena gemar berseteru dan berselisih antar sesama anak bangsa.

Tercatat setelah reformasi bergulir, organisasi-organisasi trans-nasional dengan berbagai ideologi dan kepentingannya berduyun-duyun datang ke Indonesia. Organisasi ini ada yang datang sendiri dan ada yang dibawa oleh orang Indonesia yang pernah belajar di luar negeri. Beberapa ideologi baru tersebut ada yang selaras dengan ideologi lama yang sudah tumbuh subur di Indonesia, namun beberapa lainnya, dan ini yang lebih banyak, bertentangan dengan ideologi yang ada bahkan juga bertentangan dengan kearifan lokal yang selama ini menjadi nilai-nilai adiluhung bangsa ini. Anehnya, ideologi-ideologi impor tersebut mendapat sambutan dari beberapa kalangan bangsa ini.

Secara umum, ideologi trans-nasional dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni ideologi kiri (liberalis) dan ideologi kanan (fundamentalis). Kaum liberal berpandangan bahwa pemahaman agama selalu menyesuaikan dengan perangkatnya sehingga bisa berubah. Kajian terhadap pemikiran salaf hendaklah dilakukan dengan perspektif baru karena perbedaan budaya, waktu dan tempat dapat menyebabkan perbedaan pemahaman. Dalam memahami doktrin agama harus dilakukan terobosan terobosan-terobosan baru agar bahasa agama mampu menyejarah dengan konteksnya agar agama akan menjadi doktrin-doktrin langit yang kering, gersang, bahkan kejam. Kelompok ini mengumandangkan jargon "Menuju Islam yang ramah, toleran, dan membebaskan". Salah satu gerakan liberalis Islam adalah Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dikomandoi oleh Ulil Abshar Abdala (tokoh muda NU). Untuk mensosialisasikan gagasannya, kelompok ini didukung oleh 15 koran dan radio KBR 68 H (imanaswaja.wordpress.com).

Sementara di sisi lain, kelompok fundamentalis beranggapan bahwa pemahaman agama harus didasarkan pada teks dan penafsiran-penafsiran ulama klasik karena mereka memiliki otoritas tinggi dalam memahami doktrin agama. Kelompok fundamentalisme memiliki empat karakteristik, yakni (1) oposisionalisme, (2) menolak hermeneutika *(bibliolatry)*, (3) menolak pluralisme dan relativisme, dan (4) menolak perkembangan historis dan sosiologis (Marty dalam Zuly Qadir, 2004:337-38). Sejalan dengan pendapat tersebut, Jamhari dan Jajang

jahroni (2004) mencatat bahwa, gerakan fundamentalisme dicirikan oleh purifikasi agama, pemikiran sosial-politik, metode pendidikan, dan metode pemikiran. Dalam pandangan kaum fundamentalis, Islam yang ada sekarang ini penuh dengan debu-debu zaman yang harus dibersihkan. Agenda besarnya adalah pencarian otentitas Islam yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa konsep, seperti akhlak Islam, syari'at Islam, Negara Islam, dan khilafah Islam.

Kelompok fundamentalis ini disebut juga kelompok radikal dan militan. Paling tidak ada empat gerakan salafi radikal di Indonesia; yakni Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Jamhari dan Jajang jahroni, 2004: 10). Kelompok ini bersuara dan beraksi bertolak belakang dengan mayoritas muslim di Indonesia yang dikenal moderat dan toleran. Secara fisik, kelompok memakai baju koko putih, bersorban atau berpeci, memelihara jenggot, celana di atas mata kaki, dan sering meneriakkan yel-yel "Allah Akbar". Ketika melakukan aksi, mereka sering membawa tongkat, senjata tajam, merazia tempat-tempat yang ditengerai sebagai sarang maksiat, mengirim pasukan jihad, dan menuntut pemberlakuan syari'at Islam.

Kelompok kiri dan kanan ini selalu berebut dominasi dengan menerbitkan buku, membuat media (baik cetak maupun elektronik), sampai mendirikan lembaga-lembaga sosial keagaman dan politik. Bahkan tak jarang mereka saling mencaci. Kelompok kiri menilai kaum fundamentalis sebagai kaum yang membuat agama menjadi otoriter dan kejam bahkan mengacaukan tatanan dunia (Bassam Tibi, 1998, Ulil Abshar Abdala, 2005). Sementara kelompok kanan (fundamentalis) menuduh bahwa kaum liberalis telah dipengaruhi oleh metode pemikiran Barat sehingga menafsirkan doktrin agama berbeda dengan tradisi ulama Islam sehingga mendangkalkan iman umat Islam, menjadikan murtad, dan bahkan kafir (Hartono Jaiz, 2002; Adian Husaini, 2003).

Apa yang membuat ideologi asing itu masuk dan diterima oleh sebagian saudara kita? Setidaknya ada dua penyebab utama mengapa

ideologi asing tersebut dengan mudah masuk dan diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia, yakni lemahnya pengawasan negara dan krisis ekonomi berkepanjangan. Pengawasan negara yang lemah dan sulitnya mencari penghidupan membuat sebagian saudara kita mudah terpengaruh oleh ideologi impor tersebut.

Memang sejak reformasi bergulir, negara disibukkan dengan gonjang-ganjing politik yang tiada henti. Para elit politik negeri ini sibuk memikirkan nasib diri dan partainya sendiri-sendiri.Jika reformasi lahir karena tuntutan rakyat yang tidak menginginkan penguasa yang diduga korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), para elit partai era reformasi juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Bahkan ada yang semakin gila. Almarhum Gus Dur, salah satu tokoh reformasi yang kemudian terpilih menjadi presiden selama dua tahun kemudian diturunkan, dalam kelakarnya mengatakan, jika pada masa orde baru korupsi dilakukan di bawah meja, di masa reformasi korupsi dilakukan di atas meja dan tak jarang mejanyapun dikorupsi sekalian. Kegaduhan politik dan perebutan kekuasaan inilah yang membuat kontrol negara terhadap masuknya berbagai ideologi trans-nasional mudah masuk ke Indonesia.

Reformasi memang akhirnya juga mengakibatkan krisis ekonomi. Orang-orang di warung kopi sering memelesetkan istilah reformasi dengan *repotnasi* (susah makan). Ya, *repotnasi* karena nilai tukar rupiah rendah, harga menjulang tinggi, pekerjaan susah, penghasilan berkurang, hidup semakin sulit. Para ekonom menyebut keadaan ini sebagai krisis ekonomi. Krisis ekonomi atau *repotnasi*, menurut hemat saya, adalah salah satu akibat dari (maaf) rakusnya para elit politik negeri terhadap kekuasaan yang menyebabkan kegaduhan dan gonjang-ganjing politik. Bagi mereka, kekuasaan adalah fasilitas, gaji, dan kemewahan lainnya, bukan amanah dan tanggung jawab yang harus diembannya untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.

Kondisi-kondisi seperti di atas telah ikut andil dalam mudahnya ideologi asing masuk dan diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia. Masuknya ideologi-ideologi manca ini kemudian berhadapan dengan

ideologi-ideologi lama yang sudah menjadi bagian dalam hidup masyarakat Indonesia. NU sebagai organisasi keagamaan terbesar tentu sedikit banyak ada warganya yang terpengaruh dan bergabung dengan organisasi baru tersebut. Karena ideologi yang dikembangkan NU berbeda dengan ideologi impor dan secara kultur NU mengikutime todedakwahWaliSangadanulama-ulamaterdahulu yang bisa beradaptasi dengan budaya setempat. Selain itu, kaderisasi yang berbasis pesantren membuat kader Islam memiliki kekuatas menangkal masuknya ideologi asing.

Godaan Politik Praktis

Adalah hak bagi setiap warga negeri ini untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Berserikat yang dimaksud bukan hanya membentuk organisasi masyarakat (ormas) saja seperti NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, FUI, FPI, Forkot, AJI, Parfi, Paramadina, Pecinta Lingkungan, Pecinta Hewan, AJI, dan semisalnya, melainkan juga membentuk organisasi politik dalam bentuk partai politik (parpol) layaknya partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PBB, dan sejenisnya. Termasuk di dalamnya, warga nahdhiyyin juga berhak untuk berkiprah di dunia politik. Masa reformasi adalah momentum yang tepat untuk menyalurkan libido politik mereka dengan mendirikan partai-partai baru dengan asas yang sesuai dengan ideologi yang dipeluknya.

Di dalam bernegara, NU berpandangan bahwa negara yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat wajib dipelihara dan dipertahankan eksistensinya. Untuk itu, bertepatan dengan tumbangnya penguasa Orde Baru dan datangnya Era Reformasi, aspirasi warga nahdhiyin dari berbagai pelosok menyuarakan pentingnya NU ikut aktif berpartisipasi dalam pergumulan politik nasional. Hal ini dapat dimaklumi karena NU sebagai organisasi terbesar dengan anggota lebih dari 40 juta umat dalam perjalanan sejarah negeri ini selalu dimarjinalkan. Kalaupun pernah dianggap penting perannya hanyalah ketika penguasa menganggap NU dapat dimanfaatkan, setelah itu kembali dipinggirkan. Misalnya,

saat Soeharto menyusun kekuatan orde baru, NU di rangkul untuk membantu menumpas PKI yang disinyalir akan mengganggu perjalanan pemerintahan orde baru. Namun, setelah PKI hancur, NU kembali ditinggalkan dan dipinggirkan. NU kembali tak diperhitungkan dalam pengelolaan negeri ini. Akhirnya, NU mengambil posisi sebagai oposisi atau "anak nakal" yang dimotori oleh Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) selama pemerintahan orde baru. Namun, posisi itu dirasa perlu dipikirkan ulang berkenaan dengan datangnya Era Reformasi karena NU ingin berperan aktif dalam menentukan arah dan tujuan negara ini demi mewujudkan negeri yang berdaulat, adil, dan makmur; *baldatun thaiyibatun wa rabbun ghafur.*

Dalam perjalanan sejarah sejak lahirnya tahun 1926, Koirudin (2005: 4) membagi perjalanan NU dalam lima fase atau periode. *Periode pertama,* NU berdiri sebagai organisasi keagamaan. *Periode kedua,* NU mulai berpolitik, sekitar tahun 1942-1952. Pada masa ini NU berfusi dengan kelompok lain dan membentuk partai Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Namun, warga NU kecewa karena peran yang mestinya diberikan tidak didapatkan. Karena itu, pada muktamar ke- 19 NU di Palembang 1952, NU keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik. *Periode ketiga,* setelah NU resmi menjadi partai politik, pada 1955 ikut pemilu dan menjadi 'tiga besar' pemenang pemilu setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, sekali lagi warga NUharus menelan kekecewaan karena tidak mendapat peran signifikan dalam penyelenggaraan negara. Pada masa ini juga NU ikut andil besar dalam lahirnya Orde Baru, yakni ikut menumpas PKI yang saat itu ingin mengkudeta. Sekali lagi, setelah Soeharto naik sebagai penguasa Orde Baru, NU ditinggalkan bahkan dimarjinalkan. Pada pemilu 1971, NU dengan 40 juta anggota sama sekali tidak dilibatkan dalam pemerintahan untuk mengelola negeri ini. Ironis memang.

Periode keempat, kekecewaan warga NU yang tidak dilibatkan dalam mengelola negara mendorong elit NU untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, peran politik warga

nahdhiyin selalu diabaikan dan dipinggirkan oleh penguasa Orde Baru. Bahkan, rezim Orde baru selalu ikut campur mengganggu dalam setiap kegiatan-kegiatan NU, baik kegiatan politik maupun kegiatan keagamaan. Mengingat besarnya tekanan dan gangguan penguasa dan tidak kondusifnya kondisi internal PPP, akhirnya NU keluar dari PPP dan kembali kepada khittah 1926. Dengan demikian, warga NU disilakan untuk tetap di PPP atau masuk Golkar maupun PDI.

Periode kelima, dimulai 1998, NU masih tetap sebagai organisasi keagamaan. Namun seiring perkembangan politik yang ada pada saat itu, yakni tumbangnya kekuasaan Orde Baru dan mulainya Era Reformasi, NU mulai melihat momentum untuk bisa lebih berperan secara politik. Untuk itu, pada muktamar ke- 30 di Lirboyo 1999, memutuskan agar warga NU menggunakan hak politiknya secara bebas, kritis dan rasional sesuai dengan kultur dan aspirasi politiknya dengan tetap berpegang pada prinsip khittah 1926 dan sembilan pedoman berpolitik NU. Pada periode ini, NU membidani lahirnya bayi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kondisi NU yang selalu dimarjinalkan setelah dimanfaatkan dalam perjalanan sejarah NU, oleh Bahrul Ulum (2002) dilihat sebagai pergeseran paradigma politik di tubuh NU. Karena pergeseran tersebut dinilai selalu merugikan NU dan warga NU, ia pun bertanya apakah ini karena bodohnya NU atau karena NU dibodohi. Bagaimana tidak? NU dalam kondisi diperlukan selalu diminta maju untuk berjuang, namun setelah berhasil berjuang, peran yang mestinya diberikan tidak diberikan malah dipinggirkan dan diabaikan.

Bagi warga NU, kekuasaan adalah milik Allah yang dititipkan kepada hambanya yang memiliki kompetensi dan mampu mengemban tanggung jawab. Kekuasaan tersebut harus dikelola untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, NU yang pada muktamar sebelumnya memegang teguh khittah sebagai organisasi sosial keagamaan ikut larut dalam uforia reformasi dan ikut-ikutan mendirikan partai politik. Memang namanya bukan partai NU, sehingga orang bisa berargumen bahwa NU tetap pada khittahnya, namun para

elit NU berperan penting dalam membidani lahirnya bayi partai yang kemudian diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, PKB bukanlah satu-satunya partai yang diidendikkan dengan NU karena setelah PKB lahir pula Partai Kebangkitan Nahdhatul Ulama (PKNU). Dengan lahirnya partai lain dari rahim NU, Gus Dur sebagai PBNU saat itu mengeluarkan fatwa bahwa hanya PKB lah partai yang direstui PBNU bagi warga nahdhiyyin.

Dengan masuknya NU ke dunia politik praktis, banyak peran yang kemudian didapatkan oleh warga NU, bahkan sampat menduduki posisi orang nomor satu di negeri ini, yakni Presiden RI yang dipercayakan pada diri KH. Abdurrahman Wahid. Namun, disisi lain warga NU menjadi terbelah menjadi beberapa kekuatan politik. Umat pun bingung karena kyai yang mereka ikuti kini memiliki kendaraan politik sendiri-sendiri. hasil kajian Zulfi Mubaraq (2012: 105) menunjukkan bahwa dalam menyikapi langkah politik NU, para kiai NU terbelah dalam tiga kategori, yakni kiai simpatik (memihak), kiai moderat (netral), dan kiai antipatik (menentang).

Peran besar yang diberikan kepada NU di samping sebagai anugerah juga sekaligus musibah karena meski mendapat peran politik, warga NU menjadi terkotak-kotak sesuai baju politiknya, yakni ada yang ke PKB, PKNU, dan PNU. Apalagi, akhirnya setelah dua tahun, kursi kekuasaan tersebut tidak mampu dipertahankan seiring meningkatnya eskalasi politik saat itu. Ironisnya, yang menjatuhkan KH. Abdurrahman Wahid dari kursi presiden adalah mereka yang dulu berusaha keras mengangkatnya.

Tentang jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan, Mudjia Raharjo (2007) melihat dari pertarungan wacana yang terjadi antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan Amin Rais (Ketua MPR), Akbar Tandjung (Ketua DPR), dan Megawati Soekarnoputri (Wakil Presiden). Raharjo menyimpulkan bahwa wacana politik Gus Dur ditafsirkan secara berbeda oleh pesaing politiknya, Megawati, Amin Rais, dan Akbar Tandjung, sesuai dengan kepentingan politiknya. Karena wacana politik Gus Dur lemah dari sisi konsistensi dan koherensi sehingga rentan

ditafsirkan pesaing politiknya untuk menyerang dirinya, Gus Dur pun kehilangan legitimasi kekuasaanya.

Penutup

Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, NU telah memantapkan landasan ideologi dan perjuangan dakwahnya. NU mengikuti metode dakwah Wali Sanga dan ulama *salafus shalih* terdahulu yang bisa beradaptasi dengan budaya setempat. Namun, ibarat tidak ada ruang yang hampa, NU lahir di masyarakat yang sudah hidup dalam sebuah budaya warisan Hindu dan Budha. Karenanya, warga NU harus bisa hidup berdampingan dengan berbagai budaya yang sudah ada sejauh budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok Islam. Selain itu, dunia yang semakin meng-global membuat warga NU harus berhadapan dengan ideologi-ideologi manca yang datang. Kondisi di tengah kepungan ideologi lokal dan trans-nasional membutuhkan penyikapan yang bijak dari warga nahdhiyin. Garis embarkasi ideologi dan strategi dakwah harus diperjelas agar warga NU tidak mudah tergiur dengan propaganda ideologi lokal maupun trans-nasional. Kaderisasi harus selalu digalakkan agar kaum nahdhiyin tidak luntur meskipun tatap harus lentur kepada ideologi-ideologi dan budaya yang ada.

NU lahir sebagai respon konsisi sosial keagamaan saat itu, yakni semakin jauhnya umat Islam dengan agamanya dan semakin terjauhkannya umat Islam dengan budaya lokal yang dimilikinya. Dalam perjalanan sejarah, NU beberapa kali melakukan perubahan paradigma pemikiran dan perjuangan untuk ikut mewujudkan Indonesia yang Islami, adil, dan makmur. Dalam perubahan tersebut, NU sering menelan kekecewaan karena hanya dimanfaatkan namun tidak diberi peran yang seharusnya didapatkan. Ironis memang, sebuah organisasi besar dengan 40 juta anggota, tapi selalu dimarjinalkan dan diabaikan. Untuk dapat mendapatkan peran strategis untuk ikut menentukan arah pembangunan negeri tercinta ini, NU memutuskan untuk membidani lahirnya partai politik, yakni Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) sebagai wadah aspirasi dan perjuangan warga nahdhiyin. Namun, PKB ternyata tidak lahir sendirian, PKNU dan PNU juga ikut lahir dari rumah tangga NU. Inilah yang membuat warga nahdhiyin terbelah aspirasi politiknya.[]

Daftar Rujukan

Abdala, Ulil Abshar. 2005. Menghindari Bibliolatri Tentang Pentingnya Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam, dalam Hidayat, Komaruddin dan Gaus, Ahmad. *Islam Negara dan Civil Society.* Jakarta: Paramadina.

Husaini, Adian dan Hidayat, Nuim. 2002. *Islam Liberal; Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya.* Jakarta: Gema Insani Press.

Jamhari dan Jahroni, Jajang. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koirudin, 2005. *Menuju Partai Advokasi.* Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.

Mubaraq, Zulfi. 2012. *Perilaku Politik Kiai: Pandangan Kiai dalam Konspirasi Politik Era Gus Dur.* Malang: UIN-Maliki Press.

Rahardjo, Mudjia. 2007. *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur.* Malang: UIN Malang Press.

Qodir, zuly. 2003. *Islam Liberal; Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ulum, Bahrul. 2002. *Bodohnya NU, apa NU Dibodohi?*: Menguji Khittah, Meneropong Pergeseran Paradigma Politik. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.

Zakaria, Sumantri. 2002. *Aswaja sebagai gerakan pemikiran dan keagamaan.* Disampaikan pada Latihan Kader Aswaja (LKA) tanggal 22-24 Maret 2002 di Aswaja Centre Unisma Desa Bumiaji Batu Malang.

https://satuislam.wordpress.com/2015/08/17/author-nu-garis-lurus-ini-ternyata-seorang-wahabi/

https://imanaswaja.wordpress.com/2008/07/23/ideologi-transnasional-menjadi-tantangan-ideologi-aswaja/

Tentang Penulis

M. Jazeri lahir pada tanggal 4 Desember 1969 di Grobogan, Jawa Tengah. Pendidikannya dimulai di SDN Sambung II, MTs dan MA YATPI Godong. Selanjutnya, ia kuliah di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan S2 ditempuh di UNISMA Malang dan S3 di Universitas Negeri Malang. Waktu S3, ia mendapat beasiswa *Sandwich* di Curtin University of Technology Perth, Australia. Pendidikan nonformal yang diikutinya adalah (1) pesantrean Futuhiyah Salafiyah Godong, Purwodadi Jawa Tengah, (2) Dirasah Ulya PP. Asshiddiqiyah Jakarta, dan (3) Lembaga Bahasa LIA Jakarta.

Pengabdiannya di bidang pendidikan dimulai dengan mengajar di (1) MTs dan MA mamba'ul Ulum Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta, 1991-2000, (2) MAN II Batu Jawa Timur, 2000-2003, (3) Pesantren Mahasiswa Ainul Yaqin UNISMA Malang, 2000-2004, (4) IKA UNIBRAW Malang, 2003-2004, dan (5) IAIN Tulungagung, 2005-sekarang (6) Sanggar Kampung Indonesia Tulungagung, 2012-sekarang. Di lembaga terakhir, ia aktif sebagai pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Selain mengajar di IAIN Tulungagung, hari-harinya diisi dengan menulis artikel, buku, dan menjadi nara sumber dalam seminar ilmiah. Ia juga aktif mengisi forum diskusi rutin dua mingguan di Studi Pusat Gender (PSG), ceramah di LP Tulungagung, dan dialog interaktif di Radio Perkasa FM, Samara FM, dan R-Radio FM. Untuk berkorespondensi, ia menyediakan alamat di abahfuad69@yahoo.com.

Buku yang merupakan kompilasi tulisan dari para warga NU ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mengaktualkan potensi intelektual warga NU yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Sebagai kumpulan tulisan, topik yang diangkat cukup beragam. Ada yang memotret perspektif keagamaan, pendidikan, budaya, sosial, dan politik. Walaupun berbeda-beda perspektif, tetapi substansinya satu, yaitu NU.

Lahirnya buku ini berangkat dari fakta belum berkembangnya budaya menulis di lingkungan NU. Padahal, pengetahuan dan pengalaman warga NU cukup kaya. Kaum terdidik dari lingkungan nahdliyin juga cukup banyak. Dari waktu ke waktu, nahdliyin yang menempuh pendidikan tinggi juga semakin banyak. Kaum terdidik ini tidak hanya sekolah di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Sebagai bunga rampai, buku ini memang memiliki cakupan yang luas. tetapi marilah kita bergerak menuju aspek yang lebih substantif, yaitu memberikan kontribusi intelektual. Ya, buku ini adalah wujud kontribusi intelektual ISNU Cabang Tulungagung.

Selamat berdialektika.

LENTERA KREASINDO

ISBN: 978-602-1090-95-4

9 786021 090954